



Power Relations in The Context of Unconventional Tin Mining in the PICE Dam Area, Lenggang Village

Rahul Ikhsan¹,

Fitri Ramdhani Harahap²,

Herdiyanti³

^{1,2,3} Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung

ARTICLE INFO	ABSTRACT
ISSN: 2798-2688	<p><i>The purpose of this study is to describe all forms of unconventional tin mining practices in the Pice dam area of Lenggang Village, to analyze the process of forming power relations in unconventional tin mining practices in the Pice Dam area and to analyze the implications produced by a relationship in unconventional tin mining practices on social conditions. the local community of Lenggang Village. This study used a qualitative research method with a descriptive analysis approach. Sources of research data come from primary and secondary data. Primary data was obtained through observation and interviews with Tin Miners, Village Heads, Mining Bosses, DLH of East Belitung Regency, Mosque Management and Non-Mining Communities. Secondary data obtained through documentation and various supporting documents. The technique for determining informants used a purposive sampling technique. The theory used to analyze the phenomena in this study is the theory of power relations by Michel Foucault. The results of the study consist of: First, mining practices began based on the transition from Conventional Mining (TK) to Unconventional Mining (TI) with the economic benefits of Rajuk Unconventional Mining (TI) being very high, this occurred as a result of a change in the status of PT Timah from a State Enterprise (PN) to become BUMN which is considered as people's mining. Second, power relations consist of bosses, miners, police, village government and mosque administrators who spread the dominant discourse of mining as power-knowledge. Third, discipline occurs in the form of governmentality such as the death of the resistance movement, bias on educational issues and high levels of consumption due to the low human development index.</i></p>
Keywords:	
<i>Power Relations, Tin Mining, Unconventional Mining</i>	

Pendahuluan

Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah, termasuk diantaranya timah sebagai pendorong perekonomian masyarakat lokal sekaligus selalu menjadi suatu kegiatan usaha potensial. Pertambangan timah hingga saat ini masih diminati oleh masyarakat sebagai mata pencaharian penunjang perekonomian. Menurut Sujitno (2015: 46), sebagai catatan penambangan timah di Belitung pada tingkat yang terorganisir secara modern baru dimulai tahun 1852. Sehingga berdasarkan tinjauan tersebut bahwasanya pemanfaatan sumberdaya alam timah menjadi suatu hal yang telah mengakar terutama semenjak adanya bentuk pengolahan timah secara modern beriringan dengan kemajuan teknologi.

Proses dari berlangsungnya kegiatan pertambangan timah terdapat sebuah kontrol kekuasaan secara tersirat. Kontrol kekuasaan ditinjau berdasarkan mekanisme kekuasaan klasik yang beroperasi dalam melakukan pemanfaatan timah. Artinya, pemanfaatan sumberdaya alam timah dalam beberapa abad dapat ditelusuri jejak penguasaannya secara berkala melalui arsip-arsip intrinsik tertentu dalam masyarakat baik yang terlihat atau bersifat material maupun yang tidak terlihat pada taraf mindset.

Kegiatan pertambangan timah di kepulauan Bangka Belitung memiliki jejak relasi kuasa yang dimulai pada era kekuasaan Sriwijaya. Menurut Sujitno (2015: 51), sejak abad ke-8 Sriwijaya sudah membuktikan diri menjadi negara adidaya di Asia Tenggara dengan menguasai jalur pelayaran Internasional di masa itu yakni selat Malaka, Selat Sunda dan laut Jawa. Berdasarkan sejarah yang ada telah menunjukkan bahwa pemanfaatan timah sendiri sudah mulai dilakukan secara besar-besaran oleh kerajaan Sriwijaya yang saat itu memiliki wilayah atau cakupan kekuasaan yang luas termasuk salah satunya di Belitung.

Kemudian beberapa catatan sejarah selanjutnya menunjukkan bahwa kepulauan Bangka dan Belitung sebelum masuk dalam penguasaan kolonial menjadi bagian dari Kesultanan Palembang, yakni pada masa Sultan Abdurrahman tahun 1671. Sejak awal, konflik terjadi dalam internal kesultanan yang diiringi motif datangnya para kolonial disebabkan oleh keinginan untuk menguasai timah selain rempah-rempahnya. Saat Sultan Abdurrahman wafat pada tahun 1702 dan digantikan oleh putranya Muhammad Mansur (1703-1714), didatangkan orang-orang Tionghoa dari Batavia dan Malaka. Pada masa inilah gelombang masuknya masyarakat Tionghoa generasi pertama ke Kepulauan Bangka dan Belitung (Susilo &

Maemunah, 2009: 13). Jelas bahwa masyarakat Tionghoa merupakan imigran atau pendatang sebagai dampak dari dinamika kekuasaan pada era tersebut.

Peninggalan kebudayaan masyarakat Tionghoa era tersebut menjadi catatan sejarah dalam persebaran dari kegiatan pemanfaatan timah itu sendiri. Hal demikian ditinjau berdasarkan keputusan Sultan Muhammad Mansur untuk mendatangkan masyarakat Tionghoa sebagai buruh atau pekerja tambang timah. Dampak dari keputusan Sultan Muhammad Mansur ternyata membawa perubahan terhadap kondisi sosial-ekonomi, politik serta kebudayaan Melayu di Bangka Belitung. Pada saat itu pula bertepatan dengan peristiwa kolonisasi oleh bangsa Eropa sebagai awal dari penjajahan negara Indonesia. Bagi bangsa Eropa pada masa awal eksplorasi sumberdaya alam timah, negara Cina memang menjadi pasar potensial karena perdagangan secara langsung bisa ditukarkan dengan produk-produk Cina. Sementara Cina memanfaatkan timah sebagai bahan pembuat *tinplate* kontainer-kontainer teh Cina yang akan diekspor ke Eropa (Erman, 2009: 79). Cina juga membutuhkan timah sebagai bahan dasar untuk membuat kertas dupa, yakni kertas timah tipis untuk persembahan dalam acara keagamaan, dan timah digunakan pula untuk mencetak uang logam di Guangdong (Heidhues, 2008: 4). Sehingga secara jelas bahwa jejak dari relasi-relasi dalam penguasaan sumberdaya alam timah dilakukan oleh berbagai kekuasaan pada saat itu.

Setelah masa kedudukan Cina, selanjutnya ialah bagaimana relasi kekuasaan beroperasi ketika era kolonialisme Belanda. Upaya eksplorasi terjadi di beberapa titik lokasi yang dianggap masih memiliki cadangan timah terbesar diantaranya yaitu Pulau Bangka, Belitung, dan Singkep. Belanda sebagai bangsa kolonial membuat kerja sama kepada perusahaan swasta Jepang, yaitu Mitsubishi Kogyo Kaisha (MKK) sebagai mitra penjualan mereka. Lambat laun kekuasaan Jepang mulai mengambil alih penguasaan terhadap pemanfaatan timah di Bangka Belitung. Adapun produksi timah selama masa kedudukan Jepang dilakukan dengan menggunakan kapal keruk dan teknologi klasik tambang darat yang dibuat oleh Belanda dulunya. Produksinya diperkirakan 27.712 ton di Pulau Bangka dan 5.078 ton di Pulau Belitung (Sujitno, 2007: 138-139). Sejarah tersebut membentuk kesadaran kolektif masyarakat Bangka Belitung terhadap pemanfaatan sumberdaya alam timah. Sehingga kemudian pemanfaatan timah sampai saat ini masih eksis jika dilihat berdasarkan mindset yang telah mengakar dan dilegitimasi berdasarkan kesadaran kolektif khususnya masyarakat Belitung.

Masyarakat Belitung melihat pertambangan timah sebagai sektor usaha dominan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dahulu, pertambangan timah marak dilakukan khususnya di Belitung Timur terlepas dari

dampak yang hadir baik secara positif maupun negatif. Terutama isu-isu kesejahteraan masyarakat masih menjadi sebuah episteme secara kontinyu. Munculnya berbagai wacana yang muncul dicurigai sebagai efek relasi kuasa berdasarkan catatan sejarahnya. Sehingga pemanfaatan sumberdaya alam timah di Belitung Timur telah menunjukkan jejak relasi kuasa yang mengkondisikan pemikiran masyarakat secara historis dan bersifat instrinsik kepentingan dalam tubuh sosial.

Pelaksanaan dari kegiatan pemanfaatan timah dulunya memang masih dikatakan konvensional dan hanya dikendalikan oleh kekuasaan tertentu. Perkembangan zaman yang mengarah ke modernitas memaksakan pemanfaatan sumberdaya timah harus diatur melalui sistem birokrasi yang menghasilkan produk politik yakni aturan. Permintaan bahan baku timah oleh industrialisasi teknologi semakin meningkat menciptakan pemaksimalan produksi timah namun orientasinya adalah kepentingan para kapitalis. Sehingga secara umum, orientasi pemanfaatan timah cenderung menekankan keuntungan yang terorganisir berdasarkan kesepakatan atau negosiasi dari pihak-pihak kepentingan yang disebut sebagai relasi kuasa.

Puncak pemanfaatan timah di Bangka Belitung bermula dengan dikeluarkannya Perda Bangka Nomor Tahun 2001 oleh Bupati Bangka yakni Eko Maulana Ali tentang Pengelolaan Pertambangan Umum sebagai alih-alih untuk menyeimbangkan kembali ekonomi pasca krisis ekonomi tahun 1998 yang berdampak terhadap perkembangan kemajuan ekonomi daerah khususnya pemerosotan harga lada kala itu. Perda telah mengubah status PT Timah yang sebelumnya sebagai Perusahaan Negara (PN) beralih ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dimana Tambang Inkonvensional juga diatur didalamnya. Aturan tersebut mengubah pemaknaan Tambang Inkonvensional (TI) yang dianggap sebagai bentuk kesempatan untuk menumbuhkan ekonomi kembali normal. Pemaknaan tersebut dinormalisasikan secara kultural dan dihegemoni secara berkelanjutan pada masyarakat hingga saat ini.

Bersinggungan dengan kerusakan lingkungan pada pemanfaatan sumber daya alam timah sedikit banyaknya dimulai dari faktor penambangan yang tidak memperhatikan standar operasional prosedur (SOP) dan tidak memenuhi syarat-syarat etis pada lingkungan. Tambang inkonvensional maupun tambang ilegal sering kali termasuk salah satu isu hangat yang selalu menjadi sorotan dari penyebab kerusakan lingkungan. Jika dilihat berdasarkan pelanggaran mekanisme perizinan, pertambangan akan tetap melakukan kegiatan usahanya dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik itu dari kepentingan pihak pemodal maupun

pengampu kebijakan perizinan. Sehingga berdasarkan refleksi aturan serta pemaknaan yang berbeda oleh masyarakat, kegiatan usaha pertambangan timah inkonvensional (TI) yang ada justru semakin massif.

Kemudian kondisi tersebut diperparah dengan konteks sosial-politik dan lingkungan terkadang masih menjadi isu sensitif untuk dikaji, terlebih lagi signifikansi serta implikasi dari kegiatan pemanfaatan timah adalah keberlangsungan hidup perorangan maupun kesejahteraan masyarakat banyak. Namun, sebagian besar masih ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk turut terlibat dalam pemanfaatan. Pemanfaatan tersebut cenderung berdampak pada konflik kepentingan sumberdaya alam dari pihak yang berkompetisi. Sehingga tak jarang dampak yang akan terjadi dari berbagai kepentingan tersebut mengarah kepada eksploitasi sebagai tinjauan penting secara aspek lingkungannya. Untuk menurunkan intensitas dari konflik kepentingan yang akan terjadi, maka pada proses pemanfaatan timah harus membentuk sebuah relasi. Relasi dilakukan untuk mempermudah perizinan dari kegiatan usaha pertambangan. Sehingga persinggungan dari pihak yang berkepentingan tadi akan membentuk sebuah siklus kekuasaan.

Pada kasus yang sama tepatnya di kawasan Bendungan Pice Desa Lenggang, Kecamatan Gantung dilakukan penambangan liar. Kawasan Pice merupakan Daerah Aliran Sungai (DAS) termasuk sebagai wilayah konservatif dan Pice pula sebagai DAM atau bendungan yang memiliki sejarah tersendiri bagi masyarakat Gantung khususnya di Desa Lenggang. Pice sebagai bendungan yang mengatur irigasi perairan dan sumber cadangan air bersih pada dasarnya harus dijaga semaksimal mungkin. Namun dirasakan kontradiksi apabila dilakukan penambangan yang mengakibatkan kerusakan kandungan air berdasarkan endapan bekas tambang dan kerusakan sungai Lenggang. Massifnya peredaran wacana pemanfaatan timah dirangsang kepada masyarakat membuat isu-isu kerusakan dianggap biasa saja penambangan timah terjadi di wilayah yang terlarang atau wilayah konservatif. Penyebaran wacana tidak akan lepas dari suatu sistem kekuasaan yang disebut sebagai Relasi Kuasa.

Menurut Foucault (dalam Hardiman, 2004: 38), Relasi kuasa dipahami sebagai peristiwa yang membangun kembali fungsi dan kondisi kekuasaan berdasarkan agen-agen kuasa yang saling terikat kemudian memberikan efek yang luas melalui strategi diskursif atau ragam wacana. Dipahami bahwa wacana merupakan suatu produk kekuasaan yang tersirat melalui bahasa keseharian demi tercapainya visi kekuasaan secara tidak sadar oleh masyarakat. Sama halnya seperti wacana pemanfaatan timah yang disetujui oleh masyarakat membuat pertambangan timah

inkonvensional di wilayah terlarang semakin meningkat tanpa meninjau ulang kerusakan yang nantinya akan hadir.

Pertambangan timah konvensional berjenis rajuk di kawasan Bendungan Pice hingga saat ini masih berlangsung massif dan menariknya tak ada gerakan penolakan apapun dari pihak yang menentang baik itu dari pemerintah maupun masyarakat. Dominasi pemikiran yang terjadi membuat masyarakat merasakan bahwa semuanya dianggap normal-normal saja. Maka dari itu penelitian kali ini akan mengupas secara mendalam mengenai bagaimana relasi kekuasaan berjalan dalam penambangan timah konvensional di Kawasan Bendungan Pice Desa Lenggang

Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori Relasi Kuasa dalam menganalisis strategi kekuasaan melalui wacana, agen kuasa dan normalisasi. Penelitian yang akan dilakukan sedikit banyak akan menggunakan gagasan dari Michel Foucault sebagai pisau bedah penelitian. Foucault memberikan gagasan kritis bagaimana kekuasaan dipahami sebagai sebuah praktik sosial yang terlaksana dalam kehidupan modern saat ini. Referensi melalui karyanya seperti "*Archeology of Knowledge*", "*Discipline and Punishment*" dan beberapa karya lainnya menjadi rujukan dalam melihat serta membongkar kekuasaan berdasarkan strateginya.

Menurut Foucault (dalam Falzon, O'Leary & Jana, 2013: 132), Arkeologi pengetahuan merupakan metodologi yang didesain untuk menggali kepentingan ideologis yang mengendap sebagai pengetahuan tentang praktik, wacana dan konfigurasi sejarah yang berbeda dengan sejarah lainnya. Dalam hal pertambangan timah, konteks yang bisa menggunakan metode arkeologi pengetahuan dalam menyingkap kepentingan dari wacana pemanfaatan timah digunakan sebagai strategi diskursif oleh kekuasaan sejak lama. Pemikiran masyarakat secara kultural dan menghegemoni tindakan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertambangan. Kondisi seperti itu disebut sebagai Kekuasaan-Pengetahuan.

Kekuasaan akan menghasilkan suatu pengetahuan dan hubungan antara kekuasaan dengan pengetahuan akan tetap ada, dimana ada kekuasaan maka akan ada pengetahuan, begitu juga sebaliknya (Widiastuti, 2019: 11). Hubungan kekuasaan dan pengetahuan akan berimplikasi satu sama lain. Wacana dominan oleh kekuasaan dianggap sebagai efek dari adanya hubungan kekuasaan dan pengetahuan yang mengubah sejarah suatu zaman serta memberikan citra baik kepada masyarakat. Kaitan erat wacana dan pengetahuan pada pertambangan timah bisa ditinjau berdasarkan catatan sejarah, yakni regulasi serta aturan yang

menyebabkan adanya peralihan PT Timah sebagai Perusahaan Negara (PN) menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kemudian ditambah Perda Bangka mengenai Tambang Inkonvensional nampaknya telah mengubah persepsi masyarakat dalam memaknai Pertambangan Timah hanya sebagai bentuk kegiatan usaha yang menguntungkan tanpa melihat resiko kerusakan lingkungan dan mengabaikan Indeks Kemajuan Manusia. Sehingga hal tersebut sudah dinormalisasikan kekuasaan atau relasi kuasa melalui wacana yang menyelipkan kepentingan tertentu.

Relasi kuasa adalah sebuah peristiwa untuk membangun kembali fungsi dan kondisi kekuasaan, sehingga dapat dijalankan serta memberikan efek yang luas melalui formasi dan strategi diskursif secara intens (Edith, 2004: 332). Kekuasaan tak lagi dilaksanakan melalui perang, perjuangan, larangan atau melawan larangan. Namun era modern sekarang, kekuasaan terlaksana dalam bentuk manajemen: manajemen energi, kemampuan dan kehidupan masyarakat di mana pengetahuan tidak mungkin diabaikan (Haryatmoko, 2016: 16). Pada konteks pertambangan timah, adanya keterkaitan antara pihak-pihak tertentu merupakan bagian dari strategi kekuasaan yang berusaha memajemen setiap komponen untuk mencapai keuntungan tertentu seperti mempermudah akses sumberdaya melalui negosiasi, distribusi kepentingan, dan mempengaruhi sistem politik

Foucault menjelaskan (dalam Falzon, O'Leary & Jana, 2013: 106), bahwa kondisi historis relasi kuasa-pengetahuan lebih dikenal dengan istilah Episteme. Suatu kondisi sosial tertentu akan muncul Episteme yang menyelipkan pengetahuan baik itu secara teori maupun praktik di setiap zamannya dan tentu melibatkan praktik kekuasaan. Episteme bertujuan menormalisasikan keadaan melalui formasi wacana yang diselipkan pengetahuan tertentu. Mendisiplinkan dan mengatur penuh baik tubuh maupun pemikiran melalui intitusi negara dikenal dengan istilah *governmentality*. Episteme pada pertambangan timah yakni kegiatan tambang inkonvensional yang diselipkan pengetahuan umum dan terpadu bersama wacana dominan kemudian menormalisasikan masyarakat. Bentuk pengetahuan melalui wacana terkadang masuk kedalam pemikiran masyarakat tanpa disadari.

Pendisiplinan yang merujuk pada normalisasi dituangkan dalam karyanya "*Discipline and Punishment*" dengan tujuan menjelaskan awal mula mekanisme pendisiplinan oleh kekuasaan yang berasal dari sistem Penjara. Kekuasaan tak lagi dijalankan dengan penaklukan, kekerasan, dan kolonialisme. Namun menggantikannya dengan metode pendisiplinan melalui agen kekuasaan. Agen tersebut sangat efektif dalam menyebarkan efek dari suatu kekuasaan. Sebagai contoh, aturan yang diterapkan di Penjara dilakukan beberapa transformasi atau perubahan bentuk hukuman melalui aparat disiplin disertai "politik tubuh"

kemudian memberikan kesimpulan dengan memahami sistem penaklukan yang sama dengan penjara mampu menjadikan manusia sebagai objek pengetahuan yang tersirat dalam sebuah wacana. (Falzon, O'Leary & Jana, 2013: 140). Dalam pertambangan, kekuasaan memerlukan beberapa pihak sebagai agen kekuasaan seperti pemerintah, pemodal, penambang bahkan masyarakat itu sendiri. Tujuannya ialah untuk menyebarkan wacana dominan mengenai pemanfaatan sumberdaya alam melalui pertambangan timah inkonvensional yang dirasa menguntungkan jika dilihat dari segi ekonomi. Pemerintah, pemodal, kolektor, penambang dan masyarakat tentu memiliki motif serta strategi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Relasi kuasa dalam hal ini berusaha mengakomodir setiap kepentingan antar pihak terlibat supaya pertambangan timah bisa berjalan tanpa ada pertentangan dan siapa saja yang menentang.

Berlanjut dengan sejarah penjara, Foucault (dalam Falzon, O'Leary & Jana, 2013: 141) memaknai penjara sebagai sarana pendisiplinan bagi narapidana oleh kekuasaan melalui aparatur disiplin yang bekerja secara negatif (mengubah individu) dan positif (membuat individu menjadi lebih baik). Artinya, aparatur disiplin pada sistem penjara bertujuan untuk mengawasi narapidana secara intens dan berkelanjutan kemudian mengubah narapidana tersebut menjadi lebih baik. Kebenaran yang ditujukan kekuasaan melalui sistem penjara dengan alasan humanisme adalah sebagai upaya menutupi mekanisme kekuasaan. Dalam hal ini kekuasaan yang dijalankan seperti sistem penjara bertujuan untuk memberikan citra baik suatu kekuasaan yang berjalan. Jika dimaknai dengan konteks pertambangan inkonvensional saat ini yakni kekuasaan melalui pemerintah, pemodal, kolektor, penambang, bahkan masyarakat sebagai agen kekuasaan berusaha untuk menyebarkan wacana pemanfaatan sumberdaya dengan tujuan memberikan citra baik dari pertambangan timah inkonvensional sebagai upaya dalam mencapai kesejahteraan bersama.

Kaitan antara agen kekuasaan dengan sistem penjara juga tak lepas dari metode panoptik pada sistem penjara yang digunakan oleh kekuasaan dalam melakukan pengawasan penuh kepada narapidana. Metode panoptik singkatnya merupakan sebuah sel-sel tahanan yang didesain secara melingkar dan menggunakan penutup kaca dua arah yang hanya bisa dilihat oleh penjaga sehingga narapidana tidak bisa mengetahui siapa yang mengawasi mereka. Dengan metode tersebut membuat pengawasan terfokus pada satu arah dan memaksimalkan pengawasan oleh penjaga. Metode panoptik meminimalisir pengawasan namun efeknya bersifat berkelanjutan dan pengawasan dengan menggunakan metode tersebut akan berfungsi secara otomatis. Ada tiga tujuan yang dihadirkan melalui sistem disipliner panoptik ini.

Pertama, pelaksanaan kekuasaan lebih efektif tidak membuang banyak biaya dari segi ekonomi. Kedua, memaksimalkan pengawasan ke dalam bentuk kontrol yang tidak terlihat. Ketiga, meningkatkan kekuasaan melalui aparat disipliner yang tersebar dimanapun. Disiplin melalui panoptik menjadi efektif yang menjangkau kehidupan paling intim tanpa bisa diketahui datang dari subjek tertentu (Haryatmoko, 2016: 23).

Kekuasaan era modern bagi Foucault (dalam Falzon, O'Leary & Jana, 2013: 557), tidak lagi dilihat berdasarkan bentuknya namun dilihat berdasarkan sistem dan efeknya yang kontinu atau berkelanjutan. Kaitannya dengan konteks, yakni agen kekuasaan pada pertambangan timah inkonvensional yang menyebarkan wacana dominan tentunya berusaha untuk melakukan pendisiplinan kepada masyarakat luas dengan tujuan normalisasi secara kultural. Normalisasi secara membudaya atau kultural dalam masyarakat lebih mudah untuk memberikan efek secara berkelanjutan. Sehingga masyarakat dalam ruang lingkup pertambangan akan merasa diawasi apabila melakukan penolakan atau kritik kemudian dianggap normal-normal saja.

Strategi kekuasaan berusaha disebarkan melalui teknologi politik yakni disiplin dan biopower yang dijalankan melalui sebuah relasi kekuasaan. Relasi kuasa meliputi mekanisme, efek, beberapa relasi, dan apatur kekuasaan yang bervariasi. Tunduk terhadap disiplin, normalisasi, dan pemerintahan merupakan bentuk modifikasi sebagai dari proses berjalannya strategi kekuasaan yang berlangsung. Kekuasaan berusaha mengkonstruksi ulang istilah pemerintahan yang merupakan teknologi politik secara umum yang beroperasi di setiap negara. Kemudian biopolitik sebagai bentuk teknologi kekuasaan yang menggunakan aparat dalam mendisiplinkan masyarakat secara luas.

Metode tersebut merupakan teknologi politik yang menggunakan relasi kekuasaan yang dimana aspek disiplin, normalisasi, dan politik tubuh dianalisa kedalam istilah *Governmentality* (Falzon, O'Leary & Jana 2013: 311). Wilayah dalam pertambangan timah juga tentu memiliki wilayah administratif yang di pegang oleh suatu pemerintahan. Kemudian mentalitas masyarakat dalam suatu wilayah akan mengikuti kondisi geografis tertentu. Artinya, masyarakat dengan sumberdaya alam timah akan memiliki orientasi sebagai masyarakat pertambangan memiliki mentalitas yang dibentuk berdasarkan wacana dominan oleh kekuasaan. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa kekuasaan mengubah sifat represivitas menjadi pendisiplinan.

Beberapa persinggungan yang dijelaskan Foucault dalam menganalisa mekanisme relasi kuasa yang berkaitan pertambangan timah inkonvensional sebagai berikut:

- a) Pertama, relasi kuasa dijalankan berdasarkan wacana dominan yang dilontarkan baik secara bahasa maupun tertulis dengan menyembunyikan kepentingan ideologis tertentu melalui intuisi negara atau dikenal dengan istilah *governmentality* (Falzon, O'Leary & Jana, 2013: 123). Efek yang diberikan kekuasaan bersifat kontinyu atau berkelanjutan melalui wacana dominan. Wacana dominan dalam hal ini yaitu wacana pemanfaatan sumberdaya alam melalui tambang inkonvensional serta pengetahuan yang mengakar mengenai pemaknaan tambang inkonvensional secara membudaya atau kultural dalam masyarakat.
- b) Kedua, kekuasaan akan menghasilkan suatu normalisasi melalui pendisiplinan dan biopower atau politik tubuh guna mengatur secara penuh individu maupun masyarakat melalui menggunakan agen kekuasaan (Wijaya, 2012: 141). Normalisasi terhadap pembenaran praktik-praktik pertambangan timah inkonvensional secara berkelanjutan termasuk sebagai bentuk pendisiplinan. Pemerintah, pemodal, kolektor, dan penambang merupakan agen kekuasaan yang turut melakukan relasi demi keuntungan bersama. Relasi kuasa, bio-politik dan normalisasi terhadap masyarakat pertambangan menunjukkan wacana tersebar dimanapun oleh kekuasaan secara berkelanjutan.
- c) Ketiga, relasi kekuasaan menciptakan pengetahuan yang berelasi menjadi Kekuasaan-Pengetahuan (Ariyani & dkk, 2018: 39). Relasi kuasa pada pertambangan timah inkonvensional bukan hanya melihat dari pihak-pihak mana saja yang melakukan relasi, namun relasi kuasa diciptakan sebagai suatu pendisiplinan berdasarkan pengetahuan dominan yang diberikan kekuasaan kepada masyarakat luas.

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis deskriptif. Menurut Bailey (dalam Mukhtar, 2013: 11) penelitian deskriptif selain mendiskusikan berbagai kasus yang sifatnya umum tentang berbagai fenomena sosial yang ditemukan, juga harus mendeskripsikan hal-hal yang bersifat spesifik terhadap suatu realitas yang terjadi, bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi suatu masyarakat beserta masalah yang terjadi di dalamnya.

Oleh karena itu, metode ini dinilai relevan dalam menelusuri konsep Relasi Kuasa yang dianalisis dengan menggunakan perspektif Michel Foucault pada Pertambangan Timah Inkonvensional di kawasan bendungan Pice Desa Lenggang, Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur. Penelitian kualitatif menjadi relevan dalam penelitian ini karena secara keseluruhan peneliti membutuhkan pendalaman data deskriptif secara langsung terkait relasi kuasa yang dianalisis menggunakan perspektif Michel Foucault pada pertambangan timah konvensional di kawasan bendungan Pice Desa Lenggang, Kecamatan Gantung. Pendekatan analisis deskriptif pun kemudian menjadi relevan dalam penelitian ini karena berkaitan dengan rumusan masalah penelitian

Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh teknik wawancara dan observasi langsung oleh peneliti. Peneliti melakukan wawancara dengan Penambang, Bos Tambang, Kepala Desa, DLH Kabupaten Belitung Timur, Pengurus Masjid, Pegiat Lingkungan dan beberapa masyarakat non-penambang. Jenis wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah wawancara terstruktur yang dimana peneliti sudah memiliki pendoman pertanyaan wawancara yang akan ditanya peneliti terhadap beberapa target yang diwawancarai. Yang dimana ada sebanyak 19 orang yang akan diwawancarai oleh peneliti yang terdiri dari 8 orang penambang di kawasan Bendungan Pice, 1 orang Buruh Swasta, 1 orang nelayan sekaligus pengurus masjid, 1 orang pegiat lingkungan, 3 orang Bos Tambang, 1 orang Polsek Gantung, 1 orang DLH Kab. Belitung Timur, 1 Kepala Desa dan 2 orang RT. Sedangkan sumber data sekunder berupa dokumen, arsip seperti data Monografi wilayah Desa Lenggang sebagai pendukung data penelitian.

Hasil dan Diskusi

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara peneliti dapat melihat untuk mendeskripsikan segala bentuk praktik pertambangan timah konvensional pada kawasan bendungan Pice Desa Lenggang, menganalisis proses terbentuknya relasi kuasa pada praktik pertambangan timah konvensional di Kawasan Bendungan Pice dan menganalisis implikasi yang dihasilkan oleh suatu relasi dalam praktik pertambangan timah konvensional terhadap kondisi sosial masyarakat lokal Desa Lenggang

A. Praktik-praktik Penambangan Timah Inkonvensional di Kawasan Bendungan Pice

Desa Lenggang merupakan salah satu desa yang tercatat sebagai wilayah yang masuk dalam kategori pemetaan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau seringkali disebut sebagai WIUP. Penguatan tersebut dilandasi dengan masih banyaknya kegiatan pertambangan timah baik secara konvensional maupun inkonvensional. Bahkan tak jarang pula kegiatan penambangan dilakukan di beberapa lokasi yang dimana secara estetika bisa dikatakan kontradiksi atau bias kepentingan. Kontradiksi demikian secara singkat berbentuk ketimpangan dari hal-hal yang seharusnya memiliki tujuan yang terpisah. Salah satunya yaitu Bendungan Pice yang memiliki fungsi sebagai fasilitas irigasi pertanian dan tempat cadangan air PDAM disediakan. Namun sisi lain disekitaran bendungan Pice justru dilakukan kegiatan pertambangan inkonvensional dalam bentuk TI rajuk secara massif-eksploitatif. Tinjauan tersebut menunjukkan telah terjadinya bias kepentingan dari fungsi bendungan yang seharusnya. Sehingga hal tersebut perlu dianalisa ulang dan menggali lebih dalam mulai dari awal mula praktik-praktik pertambangan yang terjadi. Kemudian dilanjutkan dengan motivasi masyarakat penambang melakukan praktik-praktik pertambangan serta melihat orientasi dan pemahaman inheren masyarakat terhadap pertambangan itu sendiri. Di bawah ini terdapat berbagai penemuan tentang fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

1. Peralihan dari Tambang Konvensional menjadi Tambang Inkonvensional

Praktik-praktik pertambangan inkonvensional di kawasan bendungan pice dilacak berdasarkan temuan atas metode penambangan yang lebih efisien dan hanya mengeluarkan modal yang tidak terlalu tinggi. Hal tersebut diperkuat bahwasanya telah banyak masyarakat penambang beralih dari TK (Tambang Konvensional) ke TI (Tambang Inkonvensional). Peralihan tersebut mulai dari awal tahun 2011 sampai sekarang. Ditinjau kembali bahwasanya TK atau tambang konvensional dirasakan kurang efektif dikarenakan membutuhkan modal yang besar serta tempat yang sudah diakomodir berdasarkan perizinan-perizinan tertentu. Kemudian diperkuat dengan penjualan dari timah bisa dilakukan secara pribadi masing-masing. Sehingga metode tambang konvensional atau TK tidak lagi dirasa efektif terutama terhadap akses bagi masyarakat banyak.

2. Keuntungan ekonomis dari Tambang Inkonvensional (TI) jenis Rajuk yang tinggi

Motivasi dari penambang melakukan kegiatan pertambangan timah adalah hasil keuntungan dari penjualan timah yang terbilang cukup menggiurkan. Dalam suatu kontur budaya yang sama pada suatu masyarakat tentu kadang memiliki perspektif yang bersifat homogen terutama dalam memahami pola-pola motivasi pada pekerjaan yang nantinya akan menjadi suatu orientasi pemikiran menuju praktik massif pertambangan timah inkonvensional. Berbeda dengan pekerjaan lainnya yang mendapatkan gaji setiap bulan, pertambangan bisa memberikan hasil setiap hari. Hal tersebut demikian menguatkan motivasi dominan masyarakat dalam melakukan kegiatan pertambangan

Harga timah yang sudah mencapai angka 200.000/kg membuat masyarakat khususnya penambang tergiur untuk melakukan kegiatan pertambangan walaupun ditempat yang memang dilarang secara aturan seperti di kawasan bendungan Pice Desa Lenggang. Tentu dari adanya motivasi tersebut selalu diarahkan menjadi suatu orientasi ekonomi tanpa memperhatikan dampak yang akan terjadi. Sehingga kegiatan pertambangan yang terjadi dirasa kontradiksi dari yang seharusnya seperti pemaksimalan fungsi bendungan sebagai irigasi dan PDAM yang tentu membutuhkan air jernih tanpa zat kandungan sisa tambang.

Praktik penambangan timah dari TI berjenis Rajuk menjadi sektor dominan yang dilakukan oleh penambang khususnya berdasarkan harga tinggi. Harga timah yang tinggi memberikan efek stimulus kepada penambang untuk melakukan penambangan di wilayah yang bahkan dikatakan dilarang seperti wilayah bendungan Pice mulai dari hulu maupun hilir sungai. Kekhawatiran terfokus pada lokasi dari penambangan yang sangat tidak sesuai jika ditinjau dari aturan-aturan konservasi. Sehingga berdasarkan temuan lapangan, relasi kuasa dalam konteks pertambangan menciptakan konstruksi supaya masyarakat mendukung segala bentuk praktik tanpa disadari.

3. Massivitas Tambang Inkonvensional (TI) Rajuk dalam membentuk pemikiran masyarakat

Praktik-praktik dalam pertambangan timah sendiri mengandung beberapa pemahaman yang dipahami secara internal dan berkaitan dengan konteks-konteks pribadi seperti pemenuhan hidup. Maksimalisasi pemahaman inheren yang dilihat bukan semata-mata tentang pada persoalan hilir seperti praktik-

praktiknya saja, namun juga harus ditinjau berdasarkan persoalan hulunya seperti landasan apa saja yang membentuk pemikiran masyarakat penambang

Kristalisasi pemikiran tentang pemanfaatan timah dimulai sejak tahun 2004 bertepatan dikeluarkannya Perda Bangka berisikan tentang perubahan PT Timah yang sebelumnya merupakan Perusahaan Negara (PN) diubah menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Aturan tersebut memberikan celah untuk masyarakat secara terbuka dalam partisipasi eksplorasi timah. Dikatakan demikian karena sebelumnya pada pola Perusahaan Negara (PN) sangat membatasi akses masyarakat untuk menikmati hasil dari pertambangan timah. Jika dahulu penjualan timah hanya bisa dilakukan oleh pihak-pihak yang bermitra, maka peralihan yang terjadi dari implikasi Perda Bangka justru membuka seluas-luasnya partisipasi masyarakat sebagai tenaga kerja mulai dari Tambang Konvensional (TK) sampai dengan tahap mandiri yakni Tambang Inkonvensional yang bisa dilakukan secara pribadi tanpa terikat dengan perusahaan tertentu. Masyarakat yang merasakan kemudahan-kemudahan tersebut pada akhirnya pemikiran mereka terkristalisasi menjadi sub-sub budaya dalam kehidupan masyarakat khususnya Desa Lenggang

Massifnya praktik penambangan timah inkonvensional berjenis Rajuk di Desa Lenggang menciptakan sebuah kontruksi sebagai hasil dari wacana yang tersebar. Wacana disebar melalui agen-agen kekuasaan dalam konteks pertambangan timah mulai dari agen atas subjek itu sendiri maupun masyarakat sebagai objeknya. Sederhananya, wacana dominan pertambangan timah inkonvensional membentuk kebenaran dominan pula tentang hal positif dari tambang. Kebenaran dominan membentuk kontruksi sosial dilihat dari pemikiran masyarakat yang mendukung baik secara langsung maupun tidak langsung

B. Relasi Kuasa Dalam Pertambangan Timah Inkonvensional di Kawasan Bendungan Pice

Relasi kuasa merupakan sebuah mekanisme kekuasaan yang menekankan agen-agen terlibat sebagai satu-kesatuan dan berusaha menyebarkan pengetahuan dominan yang disebut sebagai wacana. Relasi kuasa dalam pertambangan timah inkonvensional khususnya pada kawasan bendungan Pice Desa Lenggang cenderung berusaha mendisiplinkan masyarakat dengan segala formasi diskursifnya. Kemudian pula bahwa relasi kuasa ingin mencapai tujuan tertentu seperti halnya orientasi keuntungan berdasarkan ideologi ekonomi. Relasi kuasa dalam pertambangan timah inkonvensional di kawasan bendungan

Pice dilihat berdasarkan keterlibatan pihak sebagai relasi kuasa dan wacana dominan sebagai bentuk kekuasaan-pengetahuan.

1. Distribusi kekuasaan dalam Relasi Kuasa Pertambangan

Siklus kekuasaan yang berbentuk relasi kuasa menjadi orientasi penting dalam mempermudah akses kegiatan serta usaha pemanfaatan sumberdaya alam dengan memperhatikan keuntungan yang bisa diakomodir. Relasi antar pihak akan memberikan peluang bagaimana wacana pemanfaatan sumberdaya sebagai bentuk pengetahuan bisa masuk dan diterima masyarakat secara umum khususnya yang masih tradisional menuju modern. Masyarakat akan lebih mudah menerima suatu wacana yang menguntungkan bagi mereka apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan persoalan ekonomi. Sama halnya Pemanfaatan sumberdaya alam yang diharapkan oleh masyarakat yakni bisa memberikan peluang dalam menumbuhkan perekonomian secara merata

Siklus dalam segala bentuk pertambangan baik secara nasional maupun internasional tidak akan pernah dari persoalan-persoalan relasi yang memiliki urgensi terorganisir demi mencapai tujuan tertentu. Tujuan-tujuan tersebut tentu merupakan sebuah kepentingan implisit atau tersirat yang termaktub dalam praktik-praktiknya. Hubungan pihak-pihak terlibat menjadi ide dominan dalam mempermudah berjalannya suatu kegiatan yang berorientasi ekonomi seperti kegiatan pertambangan timah inkonvensional di kawasan bendungan Pice. Tinjauan penting pula bahwa hubungan-hubungan sebagai relasi kuasa dianggap sangat berpengaruh besar, namun dalam hal ini relasi kuasa yang terbentuk bersifat non-praktik. Artinya, hubungan yang terjadi secara tidak kasat mata atau dibawah pengaruh alam bawah sadar. Relasi kuasa bekerja tanpa menjustifikasi bentuk-bentuk dari relasi itu sendiri. Artinya, Relasi kuasa yang berjalan dalam siklus masyarakat terjadi tanpa mempertegas bentuk relasi itu secara langsung dan tidak menunjukkan dirinya sebagai bentuk dari praktik relasi. Relasi kuasa lebih cenderung menekankan kepada relasi-kepentingan dan bukan kepada relasi interaksi.

Relasi pengetahuan dominan yang ada terbentuk berdasarkan pengetahuan yang sama yaitu mengetahui jalannya suatu praktik-praktik pertambangan yang sedang terjadi di kawasan bendungan Pice Desa Lenggang. Kemudian penambang mengetahui pihak-pihak mana saja yang bekerja dalam sebuah relasi pada pertambangan timah inkonvensional rajuk tanpa bekerja dengan pihak-pihak yang disebut sebagai bos. Tidak hanya sekedar bos saja, aparat-aparat juga turut berpartisipasi dalam kegiatan pertambangan seperti Polisi dan Tentara

sebagai agen-agen relasi kuasa. Pengetahuan dominan dari para penambang tersebut menjadi komponen penting dari sebuah relasi kuasa atau keterlibatan dari pihak-pihak yang berkepentingan tanpa penambang terlibat secara langsung. Artinya, kepentingan yang dijelaskan berbentuk sebagai pengetahuan yang sama atau disebut sebagai sebuah wacana dominan atau diskursus

Konteks penting masyarakat pada pemahaman mengenai perizinan sebagai bentuk dimensi aturan dan regulasi cenderung terlalu diabaikan. Masyarakat khususnya penambang dalam hal ini diminimalkan pemahaman mereka terhadap dimensi aturan yang menjadi pintu masuknya akses kegiatan pertambangan. Ketidaktahuan tersebut merupakan salah satu strategi dari relasi kuasa yang mengkristalisasi pemikiran penambang itu sendiri. Pemecahan fokus pada mindset penambang dalam memahami perizinan berusaha disingkirkan berdasarkan wacana dominan yang disebarkan oleh agen-agen kekuasaan. Peralihan mindset dari dimensi aturan tersebut menjadi dimensi kepentingan yang merupakan tujuan utama dibalik adanya relasi kuasa.

Berlanjut dari dimensi-dimensi yang telah dijelaskan, pada kali ini akan masuk pada distribusi kepentingan-kepentingan yang dianggap sebagai bentuk dari relasi kuasa itu sendiri. Distribusi kepentingan yang terjadi dianggap pula menjadi bagian penting dari penyebaran wacana dominan oleh penambang maupun masyarakat yang di subjektifikasikan sebagai agen-agen kekuasaan. Subjektifikasi tersebut adalah dampak sebab akibat dari pengetahuan dominan yang dirasakan bersama-sama oleh masyarakat. Distribusi kepentingan yang terjadi mencakup beberapa pihak yang notabene bukan sebagai penambang. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pertambangan timah inkonvensional di kawasan bendungan Pice Desa Lenggang termasuk diantaranya pengurus masjid yang menjadi subjek dari wacana dominan.

Pemahaman masyarakat terkhususnya masyarakat agamis terhadap distribusi kepentingan tambang terjadi secara tidak langsung. Pandangan mereka terhadap dimensi perizinan bersifat terbatas dan hanya mengetahui secara umum saja. Namun bukan hal itu yang menjadi fokus melainkan kerjasama yang disebut sebagai distribusi kepentingan terjadi secara implisit atau tersirat dari para penambang dengan pihak-pihak pengurus Masjid dalam bentuk bantuan sukarela dan tentu tujuannya adalah demi kenyamanan bersama umat muslim untuk melakukan ibadah. Pengurus masjid dalam hal ini sudah disubjektifikasikan sebagai agen-agen kekuasaan demi memperlancar kegiatan pertambangan timah inkonvensional oleh para-penambang. Kunci dari

kelancaran distribusi kepentingan adalah segala pihak merasa nyaman dan tidak merasa dirugikan satu sama lainnya

Distribusi kepentingan disalurkan dalam bentuk sumbangan sebagai hasil dari pengelolaan sumberdaya alam timah secara kolektif oleh para penambang. Sumbangan tersebut merupakan bentuk pengetahuan dominan yang disajikan ke dalam bentuk hasil materil uang. Wacana dominan beroperasi berdasarkan pemikiran masyarakat yang terorganisir secara diskursif. Sebagai fokus utamanya ialah pemanfaatan sumberdaya alam timah yang dalam hal ini dijadikan formasi wacana dalam mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat. Secara sederhana, pemanfaatan sumberdaya alam timah akan dirasakan manfaatnya ketika pembagian atau distribusinya tersebar secara merata dan bukan hanya dari penambang saja namun masyarakat non-penambang juga ikut merasakan. Rumpun-rumpun wacana tersebut berusaha untuk memberikan instrument-instrument mindest masyarakat bahwa pertambangan timah bukan hanya untuk kepentingan pribadi saja tetapi terdistribusi kepada masyarakat luas

2. Kekuasaan-pengetahuan dalam upaya pendisiplinan masyarakat

Suatu kegiatan pertambangan tak akan pernah lepas dari kontur budaya atau pemahaman masyarakat itu sendiri mulai dari penambang maupun masyarakat non-penambang. Hal-hal tersebut mempengaruhi pola-pola pengoperasian pemikiran yang beriringan dengan praktik-praktik sosial masyarakat khususnya penambang. Artinya pola-pola pekerjaan masyarakat akan turut disesuaikan berdasarkan wacana-wacana yang muncul sebagai teknologi politik dan sarat akan relasi kuasa yang berjalan didalamnya. Lalu, apakah pembentukan mindset masyarakat pertambangan timah terbentuk dengan sendirinya atau bahkan justru ada kekuasaan yang turut ikut membentuk mindset tersebut. Siklus pertambangan timah inkonvensional di kawasan bendungan Pice setidaknya bisa dipahami ke dalam pembagian 3 fokus sekaligus diantaranya yaitu; wacana dominan pertambangan timah, agen-agen kekuasaan dalam penyebaran wacana, dan *governmentality* sebagai pendisiplinan mindset masyarakat.

a) Bentuk wacana dominan

Wacana dominan yang tertera dan dipahami memiliki sifat yang beragam dan setiap mekanismenya memiliki jalan pengoperasiannya tersendiri namun saling berhubungan antara satu wacana dengan wacana berikut. Artinya sekumpulan wacana-wacana yang digabungkan menjadi satu wacana dominan adalah bentuk strategi dari formasi diskursif itu sendiri. Wacana

dominan yang dipergunakan dalam siklus pertambangan dan jalannya suatu relasi kuasa berusaha untuk melengserkan beberapa wacana yang telah dipahami masyarakat seperti wacana pengrusakan lingkungan yang jika kita lihat perlahan-lahan terlengserkan oleh wacana-wacana kemanusiaan. Sehingga masyarakat akan memiliki pengetahuan dominan sebagai akibat dari wacana dominan yang telah mengkristalisasi pemikiran mereka untuk mengabaikan wacana-wacana klasik seperti wacana aturan.

Pertambangan timah inkonvensional dikawasan bendungan pice memang secara mutlak tidak ada aturan apapun yang memperbolehkan akses penambang untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah-wilayah yang dilarang. Namun perlu ditinjau kembali bahwasanya penekanan yang terjadi adalah wacana aturan berbeda dengan wacana kebijakan dipahami berbeda dan terpisah. Kebijakan yang dimaksud merupakan salah satu dampak dari strategi diskursif yang dipahami secara kolektif masyarakat. Penekanannya terlihat jelas dari statement yang muncul untuk penambang tentu diperbolehkan untuk melakukan kegiatan pertambangan namun harus mengerti batasan-batasan wilayah. Kemudian jika digali lebih dalam kepentingan yang terjadi justru untuk mempermudah masyarakat penambang dengan alasan-alasan kemanusiaan dan dinikmati secara bersama-sama.

Penggeseran wacana dilakukan oleh aparaturnegara yang dalam hal ini kita sebut sebagai agen-agen kekuasaan. Secara pemahaman tentu aparaturnegara memiliki pengetahuan akan tugas mereka sebagai abdi negara dan penegak pendisiplinan masyarakat jika melanggar aturan ataupun regulasi yang berlaku khususnya pada kegiatan pertambangan timah inkonvensional di kawasan bendungan Pice. Kemudian aparaturnegara memberikan formasi wacana yang nantinya akan menjadi wacana dominan yang bersifat memaksa secara sadar kepada masyarakat dan beberapa spesifikasi kepentingan ideologis tersebut tertera pada antisipasi mereka untuk mengurangi konflik dengan melontarkan pemahaman kebijakan yang mereka ketahui. Dimensi antara wacana aturan dengan wacana kemanusiaan selanjutnya akan dilihat bagaimana wacana ekonomi masuk kedalam formasi diskursif dari pembentukan wacana dominan yang akan disebarkan

Masyarakat non-penambang ikut memberikan penegasan bahwa masyarakat sendiri sudah mengetahui secara bersama-sama bahwa pertambangan timah terlepas legal atau ilegal memang akan selalu

berorientasi pada ekonomi. Pemahaman tersebut dilandasi bahwa bukan hanya masyarakat Desa Lenggang namun masyarakat Belitung di dominasi oleh kegiatan pertambangan. Kemudian faktor-faktor yang muncul seperti minimnya pendidikan di Belitung hanya dianggap sebagai alasan semata. Dikatakan demikian karena pertambangan timah khususnya inkonvensional memang dikatakan sebagai pekerjaan yang tidak terikat dengan persoalan-persoalan administratif layaknya perusahaan-perusahaan yang harus melewati proses perekrutan. Sehingga faktor pendidikan yang minim menjadi bagian penguatan dari formasi diskursif melalui wacana-wacana ekonomi dan wacana-wacana ekonomi tersebut akan menjadi wacana dominan yang tergabung dengan wacana kemanusiaan.

b) Agen kekuasaan dalam penyebaran wacana

Pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah relasi kuasa, jalur kompromi serta negosiasi menjadi penting untuk menentukan kesepakatan dalam mengakumulasi sumberdaya alam yang bisa di manfaatkan dan bernilai ekonomis. Aktor-aktor dalam relasi kuasa menjadi tinjauan penting untuk membangun kembali strategi kekuasaan melalui wacananya yang beragam. Strategi yang ada terkadang menggunakan hukum, aturan dan regulasi sebagai acuan utama dalam langkah kapitalistik. Sama halnya seperti Tambang Inkonvensional (TI) yang dikeluarkan berdasarkan aturan hukum dengan pemaknaan yang berbeda.

Landasan untuk dibentuknya Pice pada tahun 1934-1936 oleh Belanda pada dasarnya bukan untuk persoalan irigasi atau cadangan air PAM namun kepentingan kapal-kapal pengangkut timah yang pada kala itu sudah beroperasi di daratan Belitung dan salah satunya adalah sungai Lenggang. Hal tersebut diperkuat dengan masih banyaknya masyarakat belitung di era tersebut yang menggunakan sumur galian untuk sumber air bersih. Kedua, Belanda tentu dalam hal ini sudah memprediksi bahwasanya cadangan timah di sekitaran wilayah perairan sungai Desa Lenggang masih terbilang banyak dan cukup untuk beberapa generasi kedepan. Ketiga, masyarakat yang dalam hal ini sebagai objek dari relasi kuasa hanya perlu dikritisasi pada tahap pemikiran kemudian nantinya menjadi subjek dari relasi kuasa itu sendiri. Wacana dominan yang dibentuk pada era-era klasik tentu akan mempengaruhi era-era yang akan datang seperti yang telah terjadi sekarang di kawasan bendungan Pice Desa Lenggang.

Sejarah era-era klasik dengan era modern khususnya pada siklus pertambangan timah akan saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Kontinuitas wacana dominan pada era klasik yang sudah mengkristal akan sulit dihancurkan yang pada akhirnya membentuk suatu masyarakat penambang sebagai dampak dari episteme yang telah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya agen-agen kekuasaan dalam sebuah relasi kuasa terutama dalam siklus pertambangan tak hanya berdasarkan pada pihak-pihak kepentingan saja namun justru adalah masyarakat itu sendiri. Dalam istilah Foucault, kekuasaan bergerak melalui Objektivikasi menjadi sebuah Subjek.

Agen-agen selanjutnya akan diperlihatkan berdasarkan distribusi kepentingan pada siklus pertambangan timah inkonvensional yang menjadi penyebaran wacana dominan, yang akhirnya akan mensubjektifikasi masyarakat untuk menjadi agen-agen kekuasaan selanjutnya. Pihak yang dalam hal ini sebagai agen-agen kekuasaan ialah masyarakat yang berfokus pada persoalan-persoalan keagamaan. Dalam hal ini wacana agama kemudian disinyalir akan menjadi wacana dominan yang akan melengkapi beberapa wacana-wacana sebelumnya. Sehingga pada akhirnya sekumpulan wacana tersebut membentuk sebuah wacana dominan sebagai formasi diskursif kekuasaan dan teknologi politik yang tak mengenal batas-batas dimensi.

Wacana agama dalam siklus pertambangan inkonvensional mungkin dirasa sangat tidak mungkin untuk dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang bersifat praktik seperti apa yang telah terjadi di kawasan Bendungan Pice Desa Lenggang. Namun pada kasus ini, salah satu wacana agama yang dipergunakan dalam memberikan kemudahan akses bagi pihak-pihak lainnya yang saling terikat adalah *Nisab*. Hal tersebut ditandai dengan pernyataan bahwasanya *Nisab* merupakan hal yang paling wajib untuk dilakukan setiap umat islam khususnya dalam pembagian hasil "harta karun" yang dalam hal ini adalah timah itu sendiri sebanyak sebanyak 15%. Pandangan-pandangan tersebut ikut hadir sebagai wacana agama yang kemudian mulai menyingkirkan wacana aturan. Singkatnya, masyarakat umum berusaha disiplinkan pemikiran mereka melalui wacana agama, dikarenakan istilah *Nisab* lebih mudah dipahami dan diterima oleh masyarakat daripada wacana aturan itu sendiri. Sehingga wacana agama beserta wacana-wacana lainnya seperti wacana kemanusiaan hadir sebagai wacana dominan atau yang sering disebut sebagai Diskursus Kuasa melalui agen-agen yang bersama-sama beroperasi untuk menyebarkan wacana dominan tersebut.

c) Kontruksi Sosial sebagai bentuk pendisiplinan

Pandangan atau perspektif dalam memahami kekuasaan dalam era modern sekarang sekiranya diperlukan suatu peninjauan kembali secara kritis melalui aliran-aliran pemikiran post-modernisme ataupun post-strukturalisme yang nantikan akan memutuskan paham-paham klasik dalam memandang kekuasaan berdasarkan sudut pandang hierarkis vertikal. Foucault beranggapan bahwa kekuasaan pada era-era modern beroperasi berdasarkan relasi-relasi yang terjadi dalam praktiknya. Istilah *governmentality* dalam gagasan Foucault berbeda dengan pemahaman *governmentality* yang sekarang ini dirasakan semakin di sempitkan maknanya dan dipahami sebatas “pemerintahan” saja. Namun Foucault berusaha untuk membangun ulang pemaknaan akan istilah *governmentality* itu sendiri sebagai sebuah metode pendisiplinan dengan tujuannya adalah populasi atau secara singkatnya adalah masyarakat. Pendisiplinan tersebut akan diarahkan pada normalisasi. Normalisasi sebagai hasil dari efek relasi kuasa dan seringkali tanpa sadar kita sebetulnya sudah didisiplinkan atau dinormalisasikan oleh sesuatu yang tidak terlihat yaitu kekuasaan itu sendiri

Realitas yang terjadi pada masyarakat belitung khususnya Desa Lenggang ternyata telah terjadi upaya-upaya pendisiplinan pemikiran yang disebut sebagai *governmentality* dalam analisa Foucault. Upaya-upaya pendisiplinan dalam lingkaran fokusnya sebuah *governmentality* yang terjadi terkesan menggunakan aparatur-aparatur, yang kemudian berusaha meyakinkan masyarakat belitung bahwa pertambangan sudah menjadi kegiatan dominan. Hal yang dimaksud kurang lebih merupakan sebuah wacana dominan untuk memerintahkan gerak tubuh masyarakat supaya mengikuti kebenaran-kebenaran dominan sebagai akibat dari wacana dominan yang diberoperasi. Seperti dalam siklus pertambangan yang terjadi, pihak-pihak kepentingan akan lebih mudah menjalankan ideologi-ideologi ekonomi tanpa perlu melakukan refresifitas dikarenakan mindset masyarakat sudah mengadopsi kebenaran dominan atau “menyetejui secara tidak sadar” untuk praktik-praktik pertambangan itu sendiri.

Penemuan-penemuan baru nampaknya menjadi pertanyaan besar mengapa pertambangan timah inkonvensional dalam setiap kasusnya selalu condrong pada ideologi-ideologi ekonomi sebagai pembenaran. Penegasan yang disampaikan oleh Pak Widi memiliki isyarat tertentu dalam menggali kepentingan yang dilakukan oleh agen-agen kekuasaan dalam penyebaran

wacana dominan. Agen-agen kekuasaan yang bergerak berusaha mempertegas masyarakat bahwa pertambangan merupakan isu-isu dominan yang dimana ideologi-ideologi ekonomi turut dicampur-adukkan dengan kultur sosial. Dikatakan demikian, karena aparatus-aparatus atau agen-agen kekuasaan tersebut berusaha untuk mensubjektifikasikan masyarakat untuk menjadi agen-agen yang diluar dari kepentingan. Artinya, pemikiran masyarakat penambang itu sendiri dibuat oleh kekuasaan atau dalam hal ini relasi kuasa melakukan *governmentality* sebagai pendisiplinan massa secara manipulatif dan bukan menggunakan refresifitas dalam pelaksanaannya. Sehingga, kritik ataupun penolakan yang terjadi dalam siklus pertambangan semakin minim untuk terjadi atau bahkan bisa dikatakan masyarakat non-penambang juga lambat laun menjadi sebagai agen-agen kekuasaan tanpa mereka sadari.

C. Implikasi Teori: Relasi Kuasa Dalam Pertambangan Timah Inkonvensional Ditinjau Berdasarkan Perspektif Michel Foucault

Nampaknya isu-isu yang telah dimunculkan oleh kebanyakan peneliti-peneliti dalam beberapa studi menunjukkan bahwa pertambangan timah konvensional masih menjadi tema-tema besar yang acapkali dibahas dalam nuansa yang berbeda-beda. Namun, pada kali ini peneliti akan mengkaji isu tambang konvensional melalui perspektif Michel Foucault yang cenderung berfokus pada gagasan hulu dari suatu mazhab-mazhab ilmu sosial. Perlu dipahami bahwa gagasan Foucault atau yang sering dikenal sebagai aliran-aliran mazhab Chicago ini memiliki sifat keilmuan yang bersifat dekonstruktif. Berbeda dengan Mazhab Kritis Frankfurt yang dirasa condong pada pemahaman kiri, Foucault tidak menjadikan suatu ideologi sebagai ketergantungan atau depondensia dari suatu gerakan sosial. Justru, Foucault berusaha untuk menghancurkan ideologi yang acapkali disebut sebagai kepentingan. Dikatakan demikian, dikarenakan ideologi-ideologi tertentu terkadang dijadikan kekuasaan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan itu sendiri. Sebagai contoh, ideologi-ideologi ekonomi atau politik ekonomi dalam masyarakat adalah sebuah wacana yang menjadi strategi kekuasaan. Tidak hanya itu, masih banyak ragam wacana-wacana lainnya diikutsertakan yang kemudian nantinya akan membentuk wacana dominan. Wacana dominan adalah bentuk formasi diskursif dan segala fenomena yang bersemayam dalam tubuh sosial akan selalu hadir wacana-wacana dominan sebagai strategi kekuasaan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Foucault memusatkan perhatiannya pada mekanisme dan strategi kekuasaan yang terkadang secara tidak sadar sudah memberikan efek yang luas serta berkelanjutan kepada masyarakat. Dalam

memahami strategi kekuasaan, Foucault pertama-tama melakukan pemisahan paham antara era kekuasaan klasik yang selalu menjustifikasi kekuasaan hanya memiliki sifat yang hierarkis. Namun pada pemahaman Foucault kekuasaan itu bersifat horizontal atau beroperasi menggunakan kumpulan-kumpulan relasi didalamnya. Mengapa demikian, dikarenakan kekuasaan yang bersifat hierarkis memiliki sosok tertentu yang diwajibkan untuk diobjektifikasikan. Kekuasaan melalui relasi kuasa dianggap akan lebih lama bertahan karena tidak adanya pensosokan tertentu yang dianggap dan diasumsikan secara dominan dan objektifikasi sebagai hegemoni. Sehingga bisa dikatakan bahwa kekuasaan adalah relasi-relasi itu sendiri.

Relasi terdekat yang bisa dipahami dalam pertambangan timah inkonvensional adalah dengan melihat hubungan antara pihak-pihak yang dicurigai berdasarkan fakta-fakta yang di dapatkan. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam pertambangan timah inkonvensional memang sangatlah sulit dilakukan, namun dengan menggunakan “kecurigaan” sebagai metode genealogi berdasarkan distribusi kepentingan tersirat atau implisit maka pihak-pihak tersebut akan semakin mudah untuk ditemukan. Pihak-pihak yang dicurigai adalah semua pihak yang mengkonsumsi wacana dominan dari agen-agen kekuasaan yang tersebar. Artinya, pihak-pihak yang terlibat adalah mereka yang mengkonsumsi wacana dominan termasuk masyarakat itu sendiri. Kaitannya dalam kegiatan pertambangan timah inkonvensional adalah bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak menunjukkan diri mereka sebagai pihak yang terlibat dikarenakan semua orang sudah disubjektifikasikan sebagai relasi kuasa itu sendiri. Sehingga bisa disimpulkan semua yang melakukan relasi kuasa adalah semua orang yang mengkonsumsi serta mengadopsi wacana dominan.

Wacana dominan seperti yang telah disinggung diatas adalah strategi dari relasi kuasa. Wacana dominan merupakan sekumpulan wacana-wacana yang kemudian dijadikan satu untuk menjadi suatu wacana dominan. Wacana dominan yang hadir dalam kegiatan pertambangan timah inkonvensional diantaranya adalah Wacana Kemanusiaan, Wacana Agama, dan ideologi-ideologi ekonomi. Wacana dominan digunakan untuk membentuk suatu kebenaran dominan. Artinya, kekuasaan tidak perlu melakukan represifitas untuk menakut-nakuti masyarakat, cukup membentuk suatu kebenaran melalui wacana dominan yang nantinya akan menjadi sebuah pendisiplinan secara tidak sadar. Lambat laun kebenaran dominan dengan dalih motif ekonomi pada kegiatan pertambangan yang disetujui masyarakat akan menciptakan sebuah kontinuitas atau keberlanjutan dari kepentingan pertambangan timah itu sendiri. Alhasil, masyarakat tanpa disadari akan melakukan kegiatan

pertambangan secara terus menerus dan bahkan kehilangan daya kritis untuk mengkritisi.

Aparatus-aparatus atau agen-agen kekuasaan yang diikutsertakan dalam penyebaran wacana dominan dalam siklus pertambangan timah menjadi kunci penting bagaimana nantinya pendisiplinan bisa dilakukan. Pendisiplinan mindset masyarakat dalam hal ini dikatakan sebagai *governmentality*. Pendisiplinan akan terjadi apabila semua pihak menyepakati kebenaran-kebenaran dominan yang terbangun dari adanya relasi kuasa, kemudian kebenaran tersebut mengkritikal menjadi sebuah kewajaran atau *common sense*. Akan semakin susah menjatuhkan sebuah tirani apabila semakin banyak relasi-relasi kuasa yang ikut bermain di dalamnya. Kaitannya adalah bahwa dalam pertambangan timah inkonvensional, kepentingan-kepentingan dari pihak-pihak yang terjalin akan semakin membuat masyarakat sulit untuk penentuan siapa yang harus dijatuhkan atau di kritik atau di lengserkan.

Governmentality yang sebagaimana telah dijelaskan adalah metode pendisiplinan. Pendisiplinan pada dasarnya memiliki 2 jenis yaitu bio-power untuk mendisiplinkan tubuh individu dan *governmentality* untuk mendisiplinkan populasi atau masyarakat. *Governmentality* bukanlah suatu pemahaman yang selalu dikaitkan dengan istilah “pemerintahan” yang bersifat praktikal. Dalam artian, *governmentality* merupakan bagian dari strategi kekuasaan yang bersifat analitikal. *Governmentality* secara jelas terjadi pada pertambangan timah inkonvensional, dilandasi dengan fakta bahwa semua masyarakat belitung menyetujui ide-ide dominan sebagai suatu kebenaran dengan motif ideologi ekonomi di dalamnya. Motif ekonomi dijadikan masyarakat belitung sebagai sebuah pembenaran dikarenakan tujuannya yang jelas adalah pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Wacana dominan – kebenaran dominan dalam pertambangan timah inkonvensional akan mengabaikan beberapa wacana-wacana lainnya seperti wacana aturan dan wacana kerusakan lingkungan yang dianggap sebagai wacana marjinal atau wacana yang tereliminasi. Alhasil masyarakat belitung termasuk masyarakat Desa Lenggang sudah dinormalisasikan secara tidak sadar.

Normalisasi tersebut akan menyentuh dan mempengaruhi beberapa hal lainnya, seperti masyarakat akan cenderung konsumtif dikarenakan pertambangan timah lebih mudah untuk mendapatkan hasil secara berulang-ulang. Konsumtivitas dilihat berdasarkan pertumbuhan ekonomi dari pemanfaatan sumberdaya alam timah yang tidak mengedepankan indeks kemajuan manusia atau *human development index* (HDI) seperti edukasi, kesehatan, kesejahteraan sosial dan aspek sosial-ekonomi lainnya Hal ini pula menyebabkan banyaknya anak-anak remaja yang putus sekolah dan

memilih bekerja sebagai penambang dikarenakan pola konsumtif yang hadir. Penambang-penambang baru tersebut lama-kelamaan akan menjadi agen-agen selanjutnya yang akan menyebarkan wacana-wacana dominan yang telah berdiri kokoh. Kemudian dampak yang terakhir adalah kerusakan lingkungan. Dikatakan demikian karena masyarakat yang telah dibentuk mindset untuk menambang dan memiliki sifat konsumtif akan melakukan kegiatan pertambangan timah secara terus menerus serta massif-eksploitatif. Apabila kegiatan pertambangan timah berlangsung secara terus menerus maka akan semakin banyak pula lahan-lahan atau wilayah yang nantinya menjadi rusak dan mengundang bencana-bencana lainnya seperti apa yang telah terjadi pada tahun 2017 yakni banjir.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan maka diambil kesimpulan bahwa Pertambangan timah inkonvensional di kawasan bendungan Pice secara realitas dimulai pada tahun 2012 dan berlangsung hingga saat ini. Hal tersebut dilandasi dengan ditemukannya metode penambangan berjenis rajuk yang dianggap lebih efisien mulai dari segi biaya maupun pengoperasiannya. Peralihan yang terjadi diperkuat dengan anggapan bahwa tambang konvensional (TK) atau tambang rakyat terlalu membatasi akses masyarakat untuk ikut berpartisipasi dikarenakan mekanisme kerja harus melalui tahapan-tahapan rekrutmen. Berbeda dengan tambang inkonvensional yang dimana masyarakat bebas untuk melakukan pemanfaatan sumberdaya alam timah.

Praktik-praktik dalam pertambangan timah inkonvensional tidak akan pernah lepas dari mindset masyarakat yang terbentuk sebagai kultur-kultur pertambangan atau singkatnya masyarakat penambang. Mindset masyarakat pertambangan haruslah dicurigai proses pembentukannya yang dimana apakah mindset mereka terbentuk dengan sendirinya atau justru ada sesuatu yang ikut membentuk. Kecurigaan tersebut pada akhirnya mengarah pada kepentingan dari kekuasaan yang berjalan melalui relasi kuasa. Relasi kuasa melakukan pendisiplinan terhadap masyarakat melalui wacana-wacana dominan yang nantinya akan menjadi suatu kebenaran dominan atau sebuah kewajaran. Wacana dominan yang hadir dalam siklus pertambangan timah inkonvensional diantaranya wacana ekonomi, wacana kebijakan, wacana kemanusiaan, dan wacana agama yang telah melengserkan beberapa wacana yang dianggap sebagai wacana marjinal seperti wacana aturan dan wacana kerusakan lingkungan.

Wacana dominan dalam siklus pertambangan timah inkonvensional disebarkan oleh aparatus-aparatus atau agen-agen kekuasaan. Agen-agen kekuasaan yang dicurigai dalam hal ini diantaranya penambang, bos, tokoh agama, dan masyarakat itu sendiri dikarenakan ikut menyetujui ide dominan secara tidak sadar. Kemudian agen-agen kekuasaan dibutuhkan untuk mempertahankan suatu kekuasaan dengan menyembunyikan sosok tirani tertentu berdasarkan relasi-relasi yang terjadi. Relasi kuasa membuat masyarakat semakin sulit untuk menentukan siapa yang harus dijatuhkan.

Kekuasaan dalam pandangan Foucault adalah sebuah relasi kuasa yang menggunakan formasi diskursif sebagai teknologi politik dan pendisiplinan sebagai metode hegemoni. Pendisiplinan memiliki 2 jenis yakni *bio-power* dan *governmentality*, *Bio-power* untuk mendisiplinkan tubuh individu dan *governmentality* untuk mendisiplinkan populasi atau masyarakat. Pendisiplinan yang terjadi dalam siklus pertambangan timah inkonvensional cenderung menggunakan metode *governmentality* dan dibuktikan dengan masyarakat belitung baik pihak-pihak kepentingan dalam tambang maupun masyarakat non-penambang sama-sama menyetujui ide-ide dominan atau ideologi ekonomi berdasarkan wacana dominan yang dikonsumsi. Sehingga masyarakat dalam hal ini sudah dinormalisasikan mindset mereka dalam memahami pertambangan timah inkonvensional sebagai motif ekonomi dan ketiadaan konflik merupakan hasil dari pendisiplinan secara halus.

Implikasi dari adanya relasi kuasa yang terjadi pada siklus pertambangan timah inkonvensional di kawasan bendungan pice adalah normalisasi terhadap mindset masyarakat. Mindset atau pemikiran masyarakat yang dipaksakan untuk patuh tersebut memunculkan budaya konsumtif. Budaya konsumtif hadir dikarenakan motif ekonomi yang dihasilkan tambang dirasakan oleh masyarakat sebagai alternatif-pragmatik. Apabila budaya konsumtif semakin tinggi, maka akan semakin banyak lahan-lahan yang harus dijadikan wilayah kerja pertambangan itu sendiri dan pada akhirnya berpengaruh pada kerusakan lingkungan yang tak kunjung terhentikan.

Referensi

- Edith, Kurzweil. 2004. *Jaringan Kuasa Strukturalisme dari Levi Strauss sampai Foucault*. Yogyakarta: Kreasi Wacana
- Erman, Erwiza. 2009. *Dari Pembentukan Kampung ke Perkara Gelap, Menguak Sejarah Timah di Bangka Belitung*. Yogyakarta: Ombak.
- Falzon, Christopher, O'Leary Timothy, & Sawicki Jana. 2013. *A Companion to Foucault*. UK: Blackwell Publishing.
- Heidhues, Mary F. Somers. 2008. *Timah Bangka dan Lada Mentok, Peran Masyarakat Tionghoa dalam Pembangunan Pulau Bangka Abad XVIII s/d Abad XX*. Jakarta: Yayasan Nabil.
- Haryanto, Sindung. 2016. *Sosiologi Ekonomi*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Hardiman, F. Budi. 2004. *Filsafat Modern: Dari Machiavelli Sampai Nietzsche*. Jakarta: PT Gramedia
- Haryatmoko. 2016. *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*. Yogyakarta: PT Kanisius.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Martono, Nanang. 2012. *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mukhtar. 2013. *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Rahman, Bustami & Ibrahim. 2009. *Menyusun Proposal Penelitian*. Pangkalpinang: UBB Press.
- Sujarweni, Wiratna. 2014. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sujitno, Sutedjo. 2007. *Dampak Kehadiran Timah Indonesia Sepanjang Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- _____. 2015. *Timah Indonesia Sepanjang Sejarah Indonesia*. Tangerang: PT Javastar Creative.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Susilo, Joko & Siti Maemunah. 2009. *Tiga Abad Melayani Dunia, Potret Tambang Timah Bangka Belitung*. Jakarta: Jaringan Advokasi Tambang (JATAM).

Suyanto, Bagong. 2017. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

Sumber Jurnal, Naskah Publikasi dan Skripsi:

Adi, Wahyu. 2012. *Kondisi Sosial Nelayan Pasca Timbulnya Tambang Inkonvensional (TI) Apung Di Bangka Belitung*. Jurnal Sumberdaya Perairan Vol. 6, No. 2, Hlm 12

Andriyani, Lusi & dkk. 2021. *Relasi Kuasa Elit Lokal dan Pemerintah Lokal Dalam Penanganan Konflik Sosial Paska Pilkada Dalam Mendukung Ketahanan Sosial*. Jurnal Ketahanan Nasional, Vol. 27, No. 1, April 2021, Hal 64

Ariyani & dkk. 2018. *Habitus Pengembangan Desa Wisata Kuwu: Studi Kasus Desa Wisata Kuwu Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan*. Jurnal Analisa Sosiologi, Vol. 4, No.2, Hlm 39

Fuady, Najmi. 2019. *Kuasa Disiplin Dalam Kepemimpinan Di Perpustakaan (Studi Kasus Kepala Perpustakaan Sekolah Sukma Bangsa Lhokseumawe)*. Jurnal Kajian Perpustakaan, Informasi Dan Kearsipan, Vol. 1 No. 2, Hlm 43

Hotimah, Oot. 2015. *Potensi Ekonomi Pada Kolong Bekas Penambangan Timah*. Jurnal Ilmiah Mimbar Demorasi Vol. 14, No. 2, Hlm 85

Mudhoffir, Abdil Mughis. 2013. *Teori Kekuasaan Michel Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik*. Jurnal Sosiologi Masyarakat Vol. 18, No. 1, Hlm 79

Rusfiana, Yudi & Hermawan, Dadang. 2019. *Potensi Bencana Alam Pasca Penambangan Timah Inkonvensional Di Kabupaten Bangka Tengah*. Jurnal Konstituen Vol. 1, No. 1, Hlm 75

Sulista. 2019. *Tambang Inkonvensional Peran Masyarakat Dan Daya Tarik Ekonomi Bagi Penambang*. Jurnal Teknologi Mineral Dan Batubara Vol. 15, No. 1, Hlm 64

Widiastuti, Rina & dkk. 2019. *Wacana Dan Relasi Kuasa Dalam Pengelolaan Objek Wisata Goa Pindul*. Jurnal Gama Societa, Vol.3 No.2, Desember 2019 Hlm 11

Wijaya, I Nyoman. 2012. *Relasi-Relasi Kekuasaan di Balik Pengelolaan Industri Pariwisata Bali*. Jurnal Humaniora, Vol. 24, No. 2 Juni 2012 Hlm 141